

LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UAKPA

PERIODE AUDITED TAHUN 2024

KANWIL DJKN DKI JAKARTA



KATA PENGANTAR

Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Kanwil DJKN DKI Jakarta) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kanwil DJKN DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kanwil DJKN DKI Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 7 Mei 2024

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii	V. Catatan Atas Laporan Keuangan	12
Daftar Isi	iii	Penjelasan Umum	12
Pernyataan Tanggung Jawab	iv	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	22
Ringkasan Laporan	6	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	27
I. Laporan Realisasi Anggaran	8	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	35
II. Neraca	9	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	41
III. Laporan Operasional	10	Pengungkapan Penting Lainnya	43
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11	Lampiran	46



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA KANTOR WILAYAH DJKN DKI JAKARTA**

JL. PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT 10410 TELEPON (021)
34835141 FAKSIMILE (021) 3441403

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode TA 2024 Audited yang berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 7 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Arif Bintarto Yuwono



Ringkasan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.198.413.135 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak. Realisasi pendapatan tersebut berada di atas estimasi Pendapatan Tahun 2024 yakni sebesar Rp56.895.209.000

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.372.486.981 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp14.784.118.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 439.874.485.292 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp1.527.603.449, Aset Tetap (neto) sebesar Rp438.200.011.385 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp146.870.458. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar sebesar Rp344.998.482 dan Rp439.529.486.810.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.179.994.037 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp17.310.589.211 sehingga terdapat Surplus dari Kegiatan Operasional sebesar Rp 40.869.404.826. Surplus Pelepasan Aset Non Lancar dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp259.625.000 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp41.129.029.826.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp441.097.611.138 ditambah Surplus-LO sebesar Rp41.129.029.826 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp0 dan dikurangi Transaksi Antar Entitas sebesar Rp42.697.154.154 sehingga Ekuitas entitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp439.529.486.810.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. Laporan Realisasi Anggaran

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PER 31 Desember 2024 DAN 2023 (Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	Desember 2024		% thd Angg	Desember 2023 REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	56.895.209.000	58.198.413.135	102	52.980.161.324
JUMLAH PENDAPATAN		56.895.209.000	58.198.413.135	102	52.980.161.324
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	11.310.880.000	10.918.427.710	97	8.534.144.356
Belanja Modal	B.2.3	3.473.328.000	3.454.059.271	99	582.300.000
JUMLAH BELANJA		14.784.118.000	14.372.486.981	97	9.116.444.356

II. Neraca

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA
NERACA
PER 31 Desember 2024 DAN 2023

(Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	0	0
Pendapatan yang masih harus diterima	C.3	1.331.938.786	1.139.698.718
Belanja Dibayar Dimuka	C.4	0	0
Persediaan	C.5	195.664.663	83.373.537
Jumlah Aset Lancar		1.527.603.449	1.223.072.255
ASET TETAP			
Tanah	C.6	370.616.438.000	370.616.438.000
Peralatan dan Mesin	C.7	18.512.438.577	16.320.150.420
Gedung dan Bangunan	C.8	104.415.592.582	102.140.432.368
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.9	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.10	8.556.500	8.556.500
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.11	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.12	(55.329.842.286)	(48.959.368.860)
Jumlah Aset Tetap		439.200.011.385	440.126.208.428
ASET LAINNYA			
Aset Lain-Lain	C.13	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	C.14	(0)	(0)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 15	146.870.458	0
Jumlah Aset Lainnya		146.870.458	0
JUMLAH ASET		439.874.485.292	441.349.280.683
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	301.638.857	159.344.086
Uang Muka dari KPPN	C.17	0	0
Pendapatan diterima dimuka	C.18	43.359.625	92.325.459
Utang yang Belum Ditagihkan	C.19	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		344.998.482	251.669.545
JUMLAH KEWAJIBAN		344.998.482	251.669.545
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	439.529.486.810	441.097.611.138
JUMLAH EKUITAS		439.529.486.810	441.097.611.138
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		439.874.485.292	441.349.280.683

III. Laporan Operasional

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

LAPORAN OPERASIONAL

(Rupiah)

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	58.179.994.037	53.282.542.482
Jumlah Pendapatan		58.179.994.037	53.282.542.482
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	0	0
Beban Persediaan	D.3	92.596.111	47.348.660
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.360.796.121	6.180.940.506
Beban Pemeliharaan	D.5	3.900.518.306	1.919.433.484
Beban Perjalanan Dinas	D.6	447.650.359	424.028.978
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	6.509.028.314	6.265.495.984
Jumlah Beban		17.310.589.211	14.837.247.612
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		40.869.404.826	38.445.294.870
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.8	259.625.000	36.000.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		259.625.000	36.000.000
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		41.129.029.826	38.481.294.870
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT – LO		41.129.029.826	38.481.294.870

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2024 DAN 2023

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	441.097.611.138	445.564.980.156
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	41.129.029.826	38.481.294.870
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI		0	0
LAIN-LAIN		0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	(42.697.154.154)	(42.948.663.888)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(1.568.124.328)	(4.467.369.018)
EKUITAS AKHIR	E.6	439.529.486.810	441.097.611.138

(Rupiah)

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI JAKARTA

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis

Kantor Wilayah DJKN Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal DJKN, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas pelayanan di bidang pengurusan piutang negara, pelayanan lelang, pelayanan penilaian, dan pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berkomitmen dengan visi:

“menjadi pengelola kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar– besarnya kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menjalankan misi sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan Negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian;
4. Melaksanakan pengurusan piutang Negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara berpedoman kepada nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagai berikut:

1. Integritas – Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral;
2. Profesionalisme – Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi;

3. Sinergi – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas;
4. Pelayanan – Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman;
5. Kesempurnaan – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Pengelolaan Kekayaan Negara diharapkan dapat memiliki karakter kontributif, instrumental, otoritatif, berkelanjutan, dan adaptif. Penjabaran lebih lanjut karakter tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kontributif berarti bahwa hasil pengelolaan kekayaan negara dapat mendorong perekonomian nasional melalui aspek penerimaan, belanja, dan pembiayaan APBN serta andil dalam penyediaan infrastruktur yang menjadi tulang punggung dan katalisator pembangunan nasional;
- b. Instrumental berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara memiliki peran penting dalam keuangan negara melalui peran konsultatif, implementatif, dan pengawasan efektif dalam manajemen aset dan investasi;
- c. Otoritatif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara DJKN menjadi acuan yang paling berpengaruh dalam tataran teoritis maupun praktis yang dapat diadopsi dan direplikasi oleh manajer aset lain di level nasional maupun internasional;
- d. Berkelanjutan diwujudkan melalui peningkatan tata Kelola dan nilai tambah aset dan investasi pemerintah yang mengurangi eksposur APBN karena adanya kemandirian finansial dan risiko yang minimum;
- e. Adaptif berarti bahwa pengelolaan kekayaan negara mampu mengambil peluang dan responsif terhadap perkembangan teknologi, perubahan iklim, tujuan pembangunan berkelanjutan, dan dinamika kontemporer lainnya;

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menetapkan Misi seperti yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Periode Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara / Lembaga.

SAKTI terdiri dari modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul aset tetap, modul piutang serta modul akuntansi dan pelaporan. SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Kanwil DJKN DKI Jakarta Periode Tahun 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kanwil DJKN DKI Jakarta yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah 6 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

REKAPITULASI JUMLAH SATKER UAPPA-W

NO	KODE WILAYAH	URAIAN	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	007	Kanwil DJKN DKI Jakarta	-	1	-	-	1
2	007	KPKNL Jakarta I	-	1	-	-	1
3	007	KPKNL Jakarta II	-	1	-	-	1
4	007	KPKNL Jakarta III	-	1	-	-	1
5	007	KPKNL Jakarta IV	-	1	-	-	1
6	007	KPKNL Jakarta V	-	1	-	-	1
Jumlah			-	6	-	-	6

*Basis
Akuntansi*

A.3. BASIS AKUNTANSI

Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Audited Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Pendapatan – LRA

1. Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan – LO

2. Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendapatan Sewa Bangunan diakui pada saat dikeluarkannya Surat Izin Penghunian secara proposional antara nilai dan periode waktu sewa
- ✓ Pendapatan Bea Lelang Pejabat Kelas II diakui pada saat diterima setoran bea lelang ke kas negara.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto. yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

3. Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban oleh pemerintah.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo.	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.
- Nilai persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - ✓ harga pembelian terakhir. apabila diperoleh dengan pembelian;
 - ✓ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - ✓ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya. dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara.

**Penyusutan
Aset Tetap****c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang Sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan penghapusan;
 - b) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang

sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan;

- c) Aset Tetap Renovasi berupa Tanah; dan
- d) Aset Tetap Renovasi yang tidak menambah masa Manfaat.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Formula Metode Garis Lurus. adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban***6. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

*Kewajiban
Jangka
Pendek***a. Kewajiban Jangka Pendek**

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

*Kewajiban
Jangka
Panjang***b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	Realisasi s.d. Desember 2024	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	58.198.413.135	56.895.209.000
Jumlah Pendapatan	58.198.413.135	56.895.209.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	10.918.427.710	11.310.880.000
Belanja Modal	3.454.059.271	3.473.238.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	14.372.486.981	14.784.118.000

Realisasi
Pendapatan
Rp58.198.413.135

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp58.198.413.135 atau mencapai 102 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp56.895.209.000. Pendapatan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp42.937.951.760. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan TA 2024

Uraian	Perbandingan		%
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	56.895.209.000	58.198.413.135	102
Jumlah	56.895.209.000	58.198.413.135	102

Perbandingan Realisasi Pendapatan Periode 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	58.198.413.135	52.980.161.324	9,85
Jumlah	58.198.413.135	52.980.161.324	9,85

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp58.198.413.135 dan Rp52.980.161.324. Penerimaan Negara Bukan Pajak Periode TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,85 persen dari TA 2023.

Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan LRA sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	90.000	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	249.569.000	36.000.000	593,24
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	10.056.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.692.000	92.117.000	(82,96)
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	180.000	(33,33)
Pendapatan Denda	4.978.806	25.369.526	(80,37)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	57.938.907.329	52.826.494.298	9,67
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	(21.000.000)	-	-
Jumlah	58.198.413.135	52.980.161.324	9,85

*Realisasi Belanja
Negara
Rp9.322.964.195*

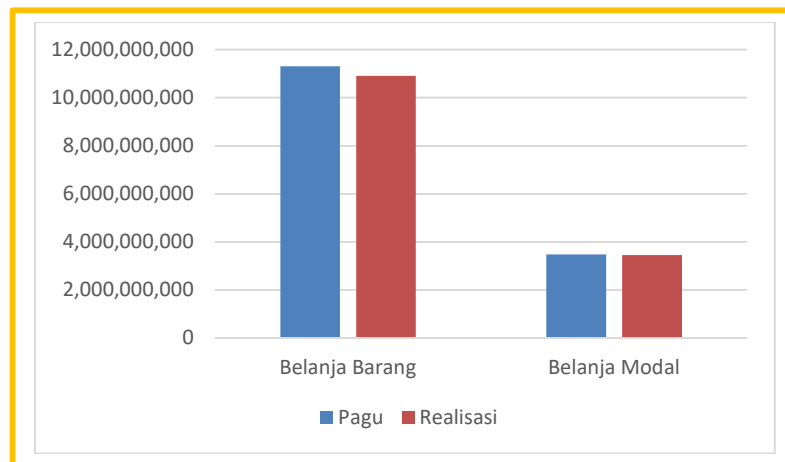
B.2. BELANJA

Realisasi belanja Kanwil DJKN DKI Jakarta per 31 Desember 2024 adalah Rp9.322.964.195 atau 63,06% dari anggaran belanja sebesar Rp14.784.118.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%Realisasi
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	11.310.880.00	10.918.427.71	97
Belanja Modal	3.473.238.000	3.454.059.27	99
Jumlah	14.784.118.00	14.372.486.98	97

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun Anggaran 2023, realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 57,65%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan pagu anggaran untuk belanja modal dan penambahan anggaran belanja operasional.

Berikut rincian realisasi belanja TA 2024 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	10.918.427.710	8.534.144.356	27,94
Belanja Modal	3.454.059.271	582.300.000	493,17
Jumlah	14.372.486.981	9.116.444.356	57,65

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp0

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 sebesar 0.00 % dari TA 2023. Hal ini disebabkan Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah mengimplementasikan sentralisasi belanja pegawai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, pengelolaan Belanja Pegawai sejak bulan Agustus tahun 2021 beralih ke Kantor Pusat DJKN.

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Belanja Uang Lembur	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja

Barang

Rp10.918.427.710

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.918.427.710 dan Rp8.534.144.356. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 24,15% dari realisasi TA 2023.

Kenaikan realisasi belanja barang pada TA 2024 dikarenakan pemberlakuan WFH semakin sedikit yang mengakibatkan pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah mulai leluasa melakukan aktivitas yang membuat belanja perjalanan dalam negeri serta adanya penambahan pagu anggaran untuk belanja operasional.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Belanja Barang Operasional	3.486.450.556	3.549.998.156	(1,79)
Belanja Barang Non Operasional	745.859.281	464.864.600	60,44
Belanja Barang Persediaan	39.997.958	5.074.330	688,24
Belanja Jasa	2.133.061.971	2.171.596.908	(1,77)
Belanja Pemeliharaan	4.065.407.585	1.919.433.484	111,8
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	457.207.630	424.028.978	13,79
Jumlah Belanja Kotor	10.927.984.981	8.534.996.456	36,91
Pengembalian Belanja	9.557.271	852.100	0
Jumlah Belanja	10.918.427.710	8.534.144.356	36,91

Realisasi Belanja

Modal

Rp3.454.059.271

B.2.3 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp935.783.157 dan 582.300.000. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.178.899.057	582.300.000	102,45
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.275.160.214	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.454.059.271	582.300.000	493,17
Jumlah Belanja	3.454.059.271	582.300.000	493,17

Realisasi Belanja Modal TA 2024 lebih besar dibandingkan dengan TA 2023 dengan kenaikan sebesar 493% dikarenakan Pagu Belanja Modal TA 2024 lebih besar dibandingkan dengan Pagu Belanja Modal TA 2023.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar R54.243.500 dan Rp0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	2024	2023
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Jumlah	0	0

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menggunakan rekening virtual pada Rekening Pengeluaran. Adapun rekening pengeluaran *Virtual Account* pada Bank Negara Indonesia dengan nomor: 9890144118521000.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

uang tunai di tangan Bendahara Penerimaan dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid dan siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Adapun jumlah kas lainnya dan setara kas sebesar Rp0.

*Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp1.331.938.786*

C.3. Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.331.938.786 dan Rp1.139.698.718. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan yang berasal dari Bea Lelang oleh Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II yang pelaksanaan lelangnya dilaksanakan bulan Desember 2024 dan pelunasannya dilakukan pada bulan Januari 2025.

*Belanja Dibayar Dimuka
(Prepaid) Rp0*

C.4. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut:

Keterangan	2024	2023
Beban Barang yang Dibayar Dimuka	Rp0	Rp0
Jumlah	Rp0	Rp0

Persediaan
Rp195.664.663

C.5. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp194.664.663 dan Rp83.373.537. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

JENIS	2024	2023
Persediaan	195.664.663	83.373.537
Jumlah	195.664.663	83.373.537

Tanah
Rp370.616.438.000

C.6. TANAH

Nilai tanah yang dimiliki Kanwil DJKN DKI Jakarta per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp370.616.438.000,00. Mutasi Aset Tetap Tanah Kanwil DJKN DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

URAIAN	KUANTITAS	NILAI
Saldo Nilai Perolehan Per 1 Januari 2024	8.773 m ²	370.616.438.000
Mutasi Tambah :		
-Pembelian		0
Mutasi Kurang :		
- Penghapusan		0
Saldo Per 31 Desember 2024		370.616.438.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024		0
Nilai Buku Per 31 Desember 2024		370.616.438.000

Peralatan dan
Mesin

Rp18.489.266.58
9

C.7. PERALATAN DAN MESIN

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp18.489.266.589 dan Rp16.320.150.420. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	16.320.150.420
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.071.673.057
Transfer masuk	1.256.505.000
Reklasifikasi Masuk	45.971.100
Koreksi Pencatatan	160.228.611
Perolehan Reklasifikasi Ekstra ke Intra	382.950
Mutasi Kurang:	
Reklasifikasi Keluar	(45.971.000)
Koreksi Pencatatan	(53.385.561)
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	(266.287.888)
Saldo per 31 Desember 2024	18.489.266.589
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(15.065.489.676)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	3.423.776.913

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berupa:

- Pembelian 2 (dua) unit Kendaraan Mini bus senilai Rp636.500.000;
- Pembelian 10 (sepuluh) unit Rak besi senilai Rp45.971.100;
- Pembelian 2 (dua) unit Alat penghancur kertas senilai Rp7.818.822;
- Pembelian 1 (satu) unit sice senilai Rp17.179.000;
- Pembelian 25 (dua puluh lima) unit AC split senilai Rp252.475.935;
- Pembelian 3 (tiga) unit Loudspeaker senilai Rp74.335.900;
- Pembelian 1 (satu) unit Mimbar/Podium senilai Rp5.280.000;
- Pembelian 1 (satu) unit Microphone / Wireless Mic senilai Rp1.395.000;
- Pembelian 1 (satu) unit Digital camera senilai Rp30.717.300
- Transfer Masuk 19 (sembilan belas) unit Lemari besi/metal senilai Rp97.850.000
- Transfer Masuk 48 (empat puluh delapan) unit Buffet senilai Rp230.400.000
- Transfer Masuk 25 (dua puluh lima) unit Meja kerja besi/metal senilai Rp309.000.000
- Transfer Masuk 1 (satu) unit Meja kerja kayu senilai Rp17.000.000
- Transfer Masuk 153 (seratus lima puluh tiga) unit Kursi besi/metal senilai Rp518.955.000
- Transfer Masuk 14 (empat belas) unit Laptop senilai Rp83.300.000
- Reklasifikasi Masuk 10 (sepuluh) unit Rak-rak penyimpanan senilai Rp45.971.100
- Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra 1 (satu) unit Vertikal Blind senilai Rp382.950
- Koreksi pencatatan nilai bertambah 9 (sembilan) unit AC Split senilai Rp53.385.561
- Koreksi pencatatan nilai bertambah 1 (satu) unit Vertikal Blind senilai Rp106.843.050

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin berupa:

- Reklasifikasi Keluar 10 (sepuluh) unit Rak-rak penyimpanan senilai Rp45.971.100
- Penghentian Aset dari Penggunaan 1 (satu) unit Rak Besi senilai Rp1.485.000
- Penghentian Aset dari Penggunaan 30 (tiga puluh) unit Meja Kerja Kayu senilai Rp89.760.000

- d. Penghentian Aset dari Penggunaan 105 (seratus lima) unit Kursi Besi/Metal senilai Rp175.042.888
- e. Koreksi Pencatatan 9 (sembilan) unit AC Split senilai Rp53.385.561

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

*Gedung dan
Bangunan*

Rp104.415.592.582

C.8. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp104.415.592.582 dan Rp102.140.432.368. Mutasi transaksi Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	102.140.432.368
Mutasi tambah:	
Koreksi Pencatatan	-
Pengembangan Melalui KDP	2.275.160.214
Mutasi Kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2024	104.415.592.582
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(40.264.352.610)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	64.151.239.972

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan Rp0*

C.9. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2024	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

Aset Tetap Lainnya
Rp8.556.500

C.10. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.556.500. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2024	8.556.500
Saldo per 31 Desember 2024	8.556.500
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	8.556.500

Aset Tetap Lainnya pada Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta berupa :

1. 50 (lima puluh) Buku Lainnya senilai Rp2.916.500;
2. 10 (sepuluh) Lukisan Kanvas senilai Rp5.640.000

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0

C.11. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Tidak adanya Konstruksi dalam pengerjaan pada Kanwil DJKN DKI Jakarta pada TA 2024.

Saldo awal per 1 Januari 2024	0
Mutasi tambah:	
Perolehan/Penambahan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Koreksi Nilai KDP Bertambah	-
Koreksi Nilai KDP Berkurang	-
Saldo per 31 Desember 2024	0

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp55.329.842.286

C.12. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp55.329.842.286 dan Rp48.959.368.860. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2024

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	18.489.266.589	(15.065.489.676)	3.423.776.913
2	Gedung dan Bangunan	104.415.592.582	(40.264.352.610)	64.151.239.972
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
	Akumulasi Penyusutan	122.904.859.171	(55.329.842.286)	67.575.016.885

Aset Lain-Lain
Rp0

C.13. ASET LAIN-LAIN

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2024	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
Mutasi Kurang:	
Barang Yang Mau Dihapuskan	-
Saldo per 31 Desember 2024	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	-
Nilai Buku per 31 Desember 2024	-

Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Lain-Lain
Rp0*

C.14. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sementara itu, amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker.

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Aset Lain-lain	-	-	-
Total	-	-	-

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp146.870.458*

C.15. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp146.870.458 dan Rp0. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari penampungan RPATA. Adapun rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Uraian	TA 2024	TA 2023
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	146.870.458	0
Total	146.870.458	0

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp301.638.857

C.16. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp301.638.857 dan Rp159.344.086. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga		
Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	301.638.857	159.344.086
Total	301.638.857	159.344.086

Uang Muka dari
KPPN
Rp0

C.17. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	0
Total	0

Pendapatan
Diterima
Dimuka
Rp43.359.625

C.18. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp43.359.625 dan Rp92.325.459. Pendapatan Diterima Di muka merupakan pendapatan sewa yang terjadi dengan pembayaran diterima di muka pada Kanwil DJKN DKI Jakarta. Adapun rincian sewa yang dimaksud berupa Sewa untuk Mesin ATM BRI, BNI serta Koperasi Bupin. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Neraca.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0

C.19. UTANG YANG BELUM DITAGIHKAN

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang mesti harus dibayarkan yang termuat dalam SPBy atau SPM yang belum di SP2D.

Ekuitas
Rp439.529.486
.810

C.20. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp439.895.817.820 dan Rp441.097.611.138. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp58.179.994.
037*

D.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp58.179.994.037 dan Rp53.282.542.482. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 9,19 persen.

Salah satu sumber pendapatan PNBPN pada tahun 2024 adalah Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, Pendapatan Jasa Lainnya, Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II, dan Pendapatan Denda Lainnya.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan 2023

URAIAN	2024	2023	%
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	90.000	0	-
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	64.657.834	64.199.791	237,40
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	249.569.000	0	-
Pendapatan Jasa Lainnya	120.000	880.000	(86,36)
Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	58.110.147.397	53.192.793.165	12,33
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	617.381	-
Pendapatan Denda Lainnya	4.978.806	24.752.145	(84,76)
Jumlah	58.179.994.037	53.283.542.482	9,19

*Beban
Pegawai
Rp0*

D.2. BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI		%
	2024	2023	
Beban Gaji Pokok PNS	-	-	-
Beban Pembulatan Gaji PNS	-	-	-
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-
Beban Tunj. Anak PNS	-	-	-
Beban Tunj. Struktural PNS	-	-	-
Beban Tunj. PPh PNS	-	-	-
Beban Tunj. Beras PNS	-	-	-
Beban Uang Makan PNS	-	-	-
Beban Tunjangan Umum PNS	-	-	-
Beban Uang Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

*Beban
Persediaan
Rp92.596.111*

D.3. BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp92.596.111 dan Rp25.361.854.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI		%
	TA 2024	TA 2023	
Beban Persediaan konsumsi	92.596.111	47.348.660	95,56
Jumlah Beban Persediaan	92.596.111	47.348.660	95,56

*Beban Barang
dan Jasa
Rp6.360.796.
121*

D.4. BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.360.796.121 dan Rp6.180.940.506.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 2,91% dibandingkan dengan Tahun 2023, hal ini disebabkan karena anggaran belanja keperluan kantor, belanja langganan listrik, Telepon, Pengiriman Surat Dinas, Honor Operasional Satker dan Barang Non Operasional Lainnya. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Beban Keperluan Perkantoran	3.397.734.182	3.390.275.036	0,22
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	-	-	-
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.639.460	5.925.662	(55,46)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81.388.000	149.424.000	(45,53)
Beban Barang Operasional Lainnya	4.688.914	4.363.458	7,45
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	-
Beban Bahan	361.859.281	103.785.600	248,7
Beban Honor Output Kegiatan	304.800.000	279.997.900	8,86
Beban Barang Non Operasional Lainnya	79.200.000	80.229.000	(1,12)
Beban Langganan Telepon	5.087.643	5.138.766	(1)
Beban Sewa	92.374.200	69.280.650	33,33
Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID 19	0	0	-
Beban Jasa Profesi	42.900.000	18.550.000	131,26
Beban Langganan Air	13.494.860	14.050.700	(3,96)
Beban Langganan Listrik	1.974.629.581	2.059.909.734	(4,14)
Jumlah	6.360.796.121	6.180.940.506	2,91

Beban
Pemeliharaan
Rp3.900.518.306

D.5. BEBAN PEMELIHARAAN

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.900.518.306 dan Rp1.919.433.484. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.086.478.084	1.141.550.403	170,37
Beban Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	646.447.748	629.231.827	2,73
Beban Pemeliharaan Lainnya	167.592.474	148.651.254	12,74
Jumlah	3.900.518.306	1.919.433.484	103,21

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp447.650.359

D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp447.650.359 dan Rp424.028.978. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,57% dikarenakan pada Tahun 2023 sudah menurunnya angka COVID-19 maka dari itu pegawai Kanwil DJKN DKI Jakarta sudah dapat kembali melakukan perjalanan dinas:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Beban Perjalanan Biasa	285.586.859	253.772.978	12,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	162.063.500	170.256.000	(4,81)
Jumlah	447.650.359	424.028.978	5,57

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp6.509.028.314

D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.509.028.314 dan Rp6.265.495.984. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.124.530.081	931.021.564	44,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.384.498.233	5.334.474.420	0,15
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional	-	-	0
Jumlah Penyusutan	6.509.028.314	6.265.495.984	3,88
Beban Amortisasi Hak Cipta	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	6.509.028.314	6.265.495.984	3,88

Surplus
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp259.625.000

D.8. SURPLUS (DEFISIT) PENJUALAN ASET NON LANCAR

Jumlah Surplus Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp259.625.000 dan Rp36.000.000. Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar sebagai berikut:

Rincian Surplus Penjualan Aset Non Lancar TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	259.625.000	36.000.000	-
Beban Kerugian Pelepasan Aset	-	-	-
Jumlah	259.625.000	36.000.000	-

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0

D.9. SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar sebesar Rp0 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp 441.097.611.138

E.1. EKUITAS AWAL

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp441.097.611.138 dan Rp445.564.980.156

Defisit LO
Rp41.129.029.826

E.2. SURPLUS/(DEFISIT) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp41.129.029.826,00 dan Rp38.481.294.870,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan
Akuntansi/
Kesalahan
Mendasar*
Rp0

E.3. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0.

*Koreksi yang
Menambah/
Mengurangi Ekuitas*
Rp0

E.4. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi*
Rp0

E.4.1 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat koreksi Atas Reklasifikasi pada Tahun 2024 dan 2023.

*Selisih Revaluasi
Aset*
Rp0

E.4.2 SELISIH REVALUASI ASET

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0. Tidak terdapat koreksi akibat selisih revaluasi aset pada tahun 2024 dan 2023.

*Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi*
Rp0

E.4.3 KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.4.2 KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Transaksi Antar
Entitas
Rp42.697.154.154

E.5. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar minus Rp 42.697.154.154 dan minus Rp42.948.663.888. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL). antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	14.372.486.981
Diterima dari Entitas Lain	(58.198.413.135)
Transfer Masuk	1.128.772.000
Jumlah	(42.697.154.154)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) dan Diterima dari Entitas Lain (DDEL) yang merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara. Pada periode hingga 31 Desember 2024, DKEL sebesar Rp14.372.486.981. sedangkan DDEL sebesar minus Rp58.198.413.135.

Ekuitas Akhir
Rp439.529.486.810

E.6. EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp439.529.486.810 dan Rp441.097.611.138.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Terdapat Pendapatan yang masih harus diterima pada Kanwil DJKN DKI Jakarta berupa pendapatan yang berasal dari Bea Lelang yang pelaksanaan Lelangnya dilaksanakan pada bulan Desember 2024 dan pelunasannya pada Bulan Januari 2025.

F.2. INFORMASI PENDAPATAN AKRUAL

Daftar informasi pendapatan akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.3. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.4. PENGUNGKAPAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Rincian Ouput menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta antara lain sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga	: Kementerian Keuangan
Unit Organisasi	: Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: Kanwil DJKN DKI Jakarta
Fungsi	: Pelayanan Umum
Sub Fungsi	: Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri
Lokasi	: DKI Jakarta

Program : Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4796	Komunikasi, Edukasi dan Standarisasi Sosialisasi dan Diseminasi Sosialiasi Pengelolaan Kekayaan Negara	194.135.000	152.460.370	78,53	819	1356	orang	100
	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	16.400.000	11.114.500	67,77	60	162	orang	100
	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	49.570.000	44.660.000	90,09	100	230	orang	100
4797	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara Pemantauan dan Evaluasi serta Rekomendasi atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	301.464.000	218.497.831	72,48	1	101	Rekomendasi	100
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara	99.614.000	90.117.725	90,47	1	1	Rekomendasi	100
	Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi serta Tindakan lanjut atas Pelaksanaan Lelang	10.792.000	10.355.500	95,96	39	44	Rekomendasi	100
4798	Pengelolaan Aset Peraturan Lainnya Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	138.838.000	117.147.507	84,38	15	48	Surat Keputusan	100
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara Peningkatan Kompetensi Pejabat Lelang	59.398.000	39.313.626	66,19	20	28	Orang	100
	Peningkatan Kapasitas SDM Penilai Pemerintah pada Instansi Daerah	6.516.000	6.363.500	97,66	5	33	Orang	100
	Pemantauan dan Evaluasi serta Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	63.151.000	16.886.460	26,74	1	4	Rekomendasi	100
	Rekomendasi Hasil Penilaian	13.738.000	13.126.000	95,55	1	2	Rekomendasi	100
	Penggalan Potensi Lelang	112.880.000	102.619.011	90,91	2	5	Rekomendasi	100
	Pengelolaan Aset BUN Aset BUN yang Dikelola	437.672.000	405.920.974	92,75	27	43	Aset	100
	Pengelolaan Aset BUN Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	26.210.000	9.357.000	35,7	5	5	Aset	100
4801	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Perizinan Profesi Perizinan Pejabat Lelang Kelas II	34.955.000	33.300.000	95,27	110	111	Orang	100
	Total	1.565.333.000	1.271.240.004	81,21				100

Program : Program Dukungan Manajemen (WA)

Kode	Kegiatan	Belanja			Output			
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
4700	Legislasi dan Litigasi Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Bantuan Hukum	61.586.000	59.502.320	96,62	7	7	Layanan	100
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum Layanan Dukungan Manajemen Internal Kerumahtanggaan	75.000.000	68.031.061	90,71	12	12	Layanan	100
	Layanan Perkantoran	9.590.271.000	9.514.425.596	99,21	12	12	Layanan	100
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal Peralatan Fasilitas Perkantoran	542.616.000	542.399.057	99,96	34	34	Unit	100
	Kendaraan Bermotor	636.500.000	636.500.000	100	2	2	Unit	100
	Gedung/Bangunan	2.294.122.000	2.275.160.214	99,17	1098	1098	m2	100
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Komunikasi Publik Pembinaan/Edukasi Publik	13.080.000	9.184.000	70,21	250	451	Orang	100
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal Layanan Manajemen Kinerja Internal Rekomendasi Kepatuhan Internal	5.610.000	5.602.000	99,86	5	7	Dokumen	100
	Total	13.218.785.000	13.110.804.248	99,18				100

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada

Prioritas Nasional 07 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran

dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pelaksanaannya di antaranya melalui 1 program prioritas, 1 kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp26.210.000 dan realisasi sebesar Rp9.357.000 dengan rincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan, Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara (PN)	26.210.000	9.357.000	35,7	Aset	5	5	100

F.5. PENGUNGKAPAN PELAKSANAAN ANGGARAN ATAS PEKERJAAN YANG BELUM DISELESAIKAN PADA AKHIR TAHUN (RPATA)

Saldo RPATA di neraca tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp146.870.458 dan Rp0. Pekerjaan kontraktual yang dibayarkan menggunakan mekanisme RPATA telah selesai dan SPM Pembayarannya telah diproses pada awal Januari 2025.

F.6. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia.

Sehingga Satuan Kerja Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta telah menganggarkan Belanja terkait penanganan COVID-19 pada tahun 2020 s.d.2022, untuk tahun 2024 anggaran untuk Pandemi Covid-19 sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah memasuki masa endemi.

Sentralisasi Belanja Pegawai

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 2/KN/2021 tentang Sentralisasi Pengelolaan Belanja Pegawai Untuk Pegawai Lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejak bulan Agustus tahun 2021 memberikan berdampak pada berkurangnya realisasi Belanja Pegawai pada Satuan Kerja di lingkup Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan beralihnya pengelolaan Belanja Pegawai ke Kantor Pusat DJKN.